



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I
TAHUN 2026



STASIUN PPMHKP SORONG
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas organisasi menyusun dan menyajikan LAPORAN KINERJA (LKj) Tahunan dan Triwulanan yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.



Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Sorong mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Permen KP 35 Tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan kinerja organisasi di lingkup Kementerian Kelautan dan perikanan serta Peraturan Kepala Badan PPMHKP Nomor : 62/PER-BPPMHKP/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan BPPMHKP.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2026 . Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Akhirnya kami berharap agar laporan kinerja ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja organisasi Stasiun PPMHKP Sorong.

Sorong, 31 Maret 2026

Kepala,



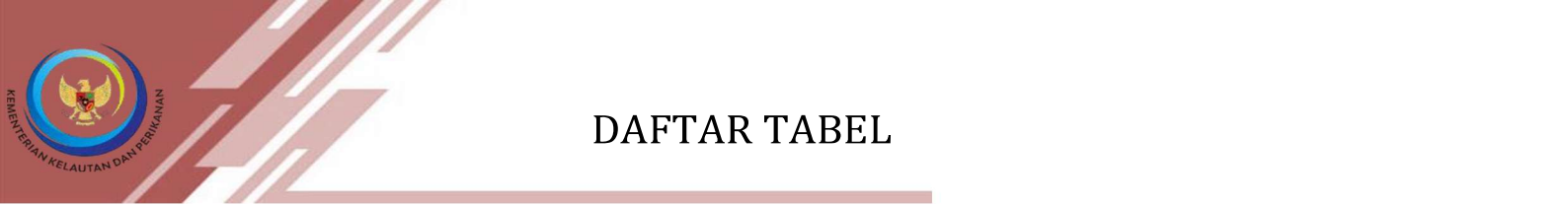
KASRIDA, S.St.Pi., M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 PROFIL ORGANISASI	1
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	
2.1 PENGUKURAN KINERJA	10
2.2 CAPAIAN KINERJA	7
2.3 ANALISA DAN EVALUASI	8
BAB III PENUTUP	
3.1 KESIMPULAN	26
3.2 REKOMENDASI.....	26
LAMPIRAN	

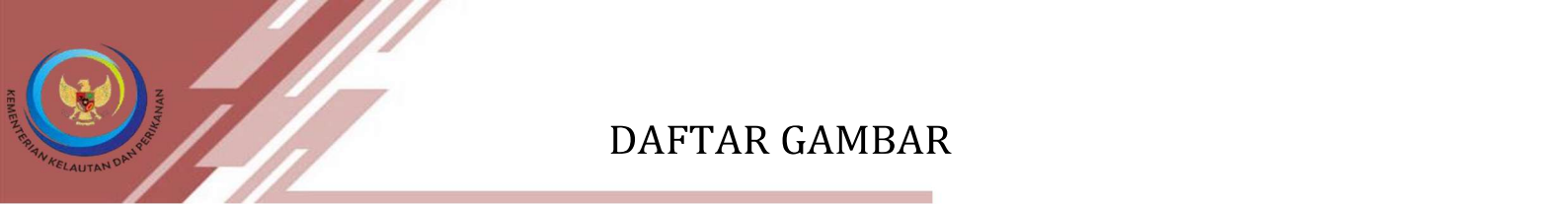




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Sorong Triwulan I Tahun 2026 terhadap target Tahunan	4
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP SorongTriwulan I Tahun 2026	9
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja 1.....	12
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja 2.....	14
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja 3.....	15
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja 4.....	15
Tabel 2.11	Capaian Indikator Kinerja 5.....	10
Tabel 2.15	Capaian Indikator Kinerja 6.....	18
Tabel 2.12	Capaian Indikator Kinerja 7.....	18
Tabel 2.13	Capaian Indikator Kinerja 8.....	19
Tabel 2.8	Capaian Indikator Kinerja 9.....	20
Tabel 2.9	Capaian Indikator Kinerja 10.....	21
Tabel 2.14	Capaian Indikator Kinerja 11.....	22
Tabel 2.16	Capaian Indikator Kinerja 12.....	23





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Sorong.....	3
Gambar 1.2	Peta Strategi Stasiun PPMHKP Sorong Tahun 2026.....	4
Gambar 2.1.	Status Indeks Capaian IKU	7
Gambar 2.2.	Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Startegis (NSPP) Triwulan I (satu) pada Aplikasi Kinerjaku KKP Tahun 2026	8
Gambar 2.3.	Dashboard Persentase Temuan Itjen KKP Pada Aplikasi SIDAK KKP Tahun 2026	19
Gambar 2.4.	Dashboard IKPA Satker Stasiun PPMHKP Sorong untuk periode s/d Maret 2026 pada Aplikasi My Interes	20





RINGKASAN EKSKLUSIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Stasiun PPMHKP Sorong pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar **108,50%**. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

- A. Terdapat 12 IKU yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kerja Tahun 2026. Pada Triwulan 1 terdapat 5 IKU yang memiliki target dan 7 IKU yang belum memiliki target.
- B. Uraian 5 IKU yang capaiannya belum memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 1. Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong. **(belum memenuhi target)**
 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Sorong; **(melebihi target)**
 3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong. **(melebihi target)**
 4. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Sorong. **(melebihi target)**
 5. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Sorong **(melebihi target)**
- C. Uraian 7 IKU yang telah ditetapkan dalam PK, namun tidak memiliki target dan realisasi pada Triwulan 1, yaitu:
 1. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan RI Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong
 2. Presentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong.
 3. Indeks Profesionalisme ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong
 4. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong
 5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong
 6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong
 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun





P RINGKASAN EKSKLUSIF

Realisasi Kinerja Keuangan Stasiun PPMHKP Sorongsampai Triwulan I Tahun 2026 mencapai **Rp. 1,021,929,934** atau **28,78%** dari pagu anggaran Stasiun PPMHKP Sorong(T.A) 2026 yang tidak terblokir (Pagu Efektif) sebesar **Rp. 3,573,254,000,-**.

Adapun pagu defenitif adalah **Rp. Rp. 3,573,254,000**, dengan jumlah blokir adalah **Rp. 22,404,000,-** yang mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 2026 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Komposisi anggaran ini mengalami perubahan dari yang semula **Rp. 3,573,254,000-** Pagu anggaran Stasiun PPMHKP Sorong tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Manajemen Mutu dan Dukungan Manajemen.







BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Stasiun PPMHKP Sorong dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Stasiun PPMHKP Sorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun PPMHKP Sorong serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Stasiun PPMHKP Sorong.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Profil Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong yang selanjutnya disebut Stasiun PPMHKP Sorong adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil



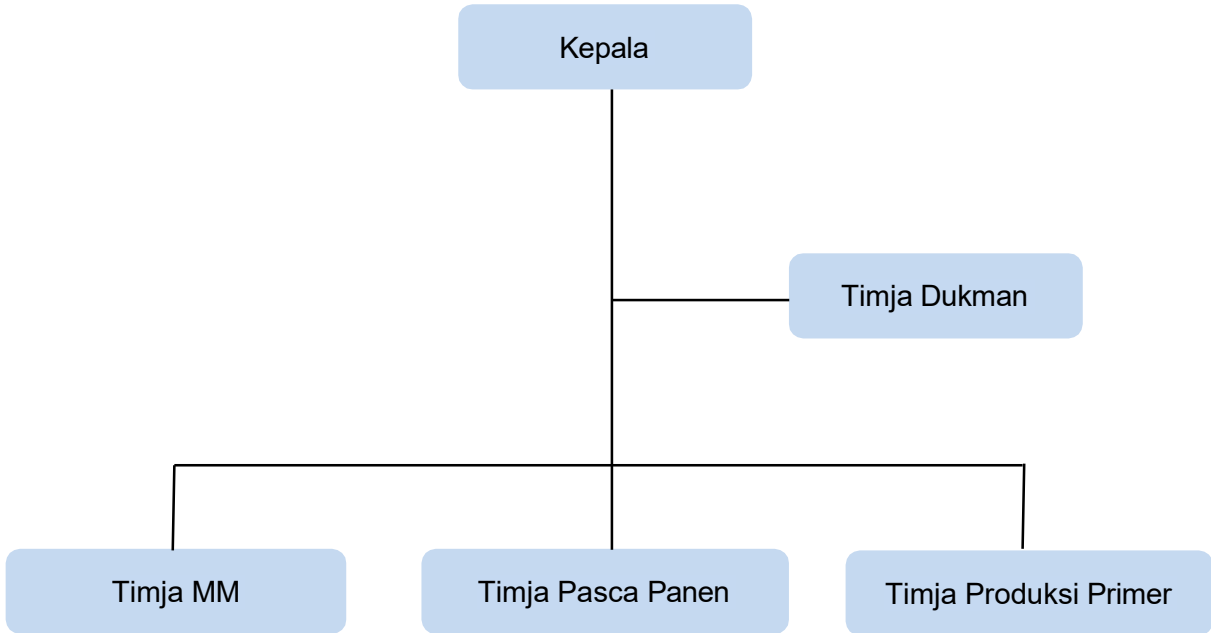
Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dan mempunyai tugas menjaga mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di Indonesia dengan adanya pengawasan yang ketat, produk perikanan Indonesia dapat bersaing di pasar internasional serta aman konsumsi di masyarakat serta penerapan sistem manajemen mutu. Namun sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, tugas/kewenangan kekarantinaan yang sebelumnya dilaksanakan di Stasiun PPMHKP Sorong beralih ke Badan Karantina Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan telah terbentuk Unit Eselon I Badan Pengendalian Mutu dan Pengawasan Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Tugas dan fungsi Unit Eselon I ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan di lingkungan KKP. Stasiun PPMHKP Sorong merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan tugas pelaksanaan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan melalui fungsi a) Pelaksanaan inspeksi, surveilans, monitoring dan evaluasi UPI dalam rangka sertifikasi PMMT, b) Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI dengan Monitoring kesegaran ikan, Residu Bahan Berbahaya; c) Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan; d) Penerapan sistem jaminan mutu pada laboratorium dan Lembaga Inspeksi; e) Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga dan tata usaha.

Stasiun PPMHKP Sorong dalam menjalankan tugasnya, memiliki pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 24 (dua puluh empat) orang pegawai, yang terdiri dari 1 Kepala UPT, 4 Pegawai administrasi dan 6 Tenaga Fungsional Inspektur Mutu /Asiten Inspektur Mutu. Selain itu terdapat 8 Pegawai PPPK dan 2 PPPKPW dan 3 Tenaga PJLP.



Bagan Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Sorong dalam Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Sorong

1.3. Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun PPMHKP Sorong Tahun 2026 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 di bawah ini.





**PETA STRATEGIS
SPPMH KP SORONG 2026**

S.01 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

S.02 : Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

S.03 : Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Sorong

Gambar 1.2 Peta Strategi Stasiun PPMHKP Sorong Tahun 2026





Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Sorong
Triwulan I Tahun 2026 terhadap target Tahunan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2026	TARGET TW I
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu					
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	72	72
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Sorong(%)	72	72
		3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	71	0
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK.2.1	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	71	0





			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TW I
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP					
SK.3.1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Lingkup BPPMHKP Sorong	5	Indeks Profesionalisme ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Indeks)	82,5	0
		6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	77	0
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	86,20	0
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Persen)	86	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	92,10	0
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	71,75	0
		11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	77	77
		12	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Indeks)	3,50	3,5



2.1. Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah a) Angka maksimum adalah 120; b) Angka minimum adalah 0.

Formula penghitungan indeks capain IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut :

a) Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula :

Indeks Capaian IKU = $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$

b) Polarisasi Minimize

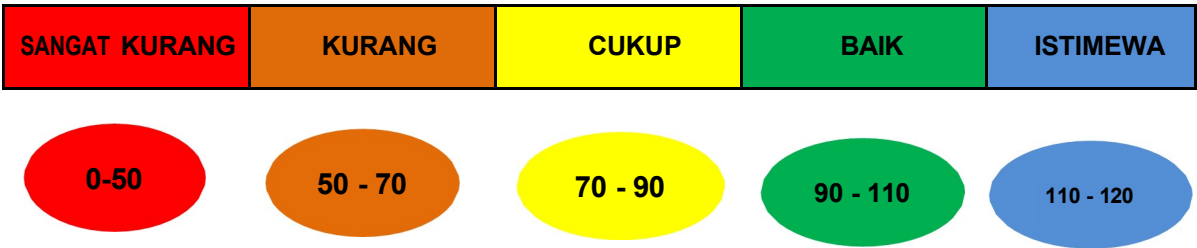
Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

Indeks Capaian IKU = $\{(1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target}))\} \times 100\%$

c) Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target

Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

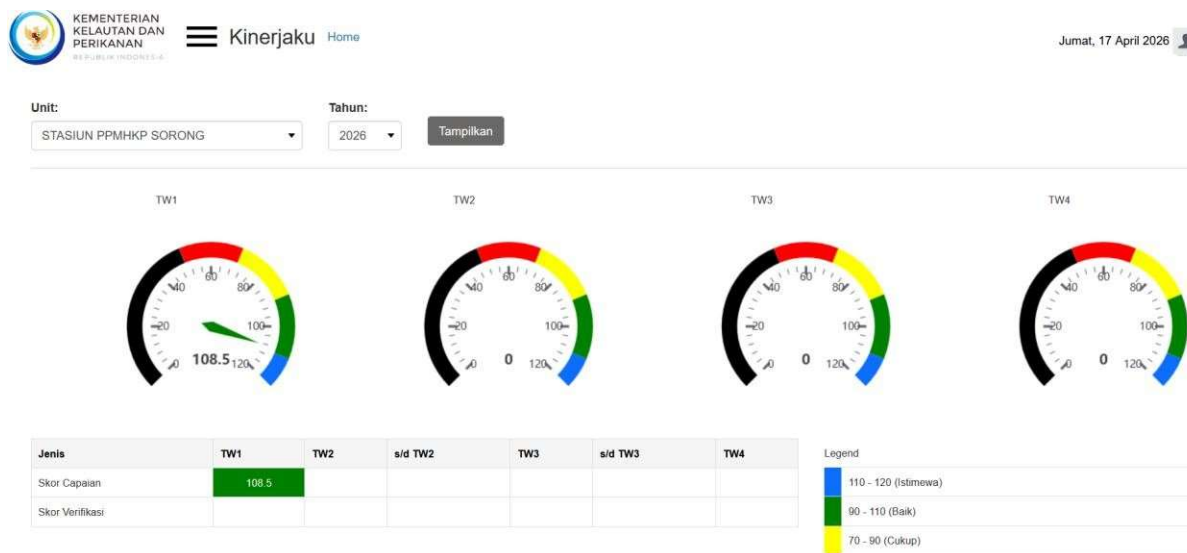


Gambar 2.1. Status Indeks Capaian IKU



2.2. Capaian Kinerja

Secara umum, target-target kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PPMHKP Sorong pada Triwulan I sebesar **108,50%** (Kategori Baik). Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap kegiatan strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program BPPMHKP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PPMHKP Sorong Triwulan I Tahun 2026 untuk setiap sasaran strategis dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP.



Gambar 2.2. Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Startegis (NSPP) Triwulan I (satu) pada Aplikasi Kinerjaku KKP Tahun 2026

NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap sasaran kegiatan organisasi. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Ringkasan capaian indikator kinerja Stasiun PPMHKP Sorong Triwulan I Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.1.



Tabel 2.1 Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP SorongTriwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TRIWULAN I		
				TARGET	REALISASI	%
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu						
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	72	68	94,44
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	72	76,76	106,61
		3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	0	0	0
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan						
SK.2.1	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	0	0	0



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TRIWULAN I		
				TARGET	REALISASI	%
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP						
SK.3.1	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Sorong	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Indeks)	0	0	0
		6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	0	0	0
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	0	0	0
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Persen)	86	100	116,28
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	0	0	0
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	0	0	0
		11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	77	100	120,0
		12	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Indeks)	3,50	3,96	113,14

2.3. Analisa dan Evaluasi

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil menurut indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Stasiun PPMHKP Sorong sesuai Permen PAN 53 Tahun 2014 sebagaimana telah diperbarui oleh Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2026, dijelaskan sebagai berikut :





Sasaran Program 1

- **Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan**

Realisasi sasaran program Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar **100,53%**. Keberhasilan pencapaian sasaran program ini diperoleh dari pencapaian indikator a). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, b). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, dan c). Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di wilayah RI.

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

IK. 1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan saat ini tidak hanya berfokus pada kegiatan di Unit Pengolahan Ikan (UPI) hilir, namun juga disektor hulu atau biasa disebut sebagai sektor produksi primer. Sektor produksi primer meliputi perikanan budidaya dan penangkapan dengan sistem penajminan yang dikenal dengan sebutan sertifikat CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap dengan sertifikat CPIB di kapal. Sektor hulu juga termasuk suplier yang berfungsi sebagai pengumpul dan sekaligus mendistribusikan ke unit pengolahan. Kegiatan pengendalian dan pengawasan pada suplier sangat penting mengingat komoditi perikanan yang cenderung mudah dalam mengalami kemuduran mutu.seiring dengan berjalannya waktu dan penanganan yang tidak sesuai. Stasiun PPMHKP Sorong melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan bagi suplier dengan Sertifikasi CPIB.

Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi indikator kinerja ini adalah :

$$(\% X = \frac{(A + B + C + D + E + F)}{xn})$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Pembenihan (%)





- C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)
- D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)
- E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)
- F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6) *)

Sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA tahun 2026 Stasiun PPMHKP Sorong ditargetkan melakukan sertifikasi terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu : 1) Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan; 2) Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan 3) Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB); namun belum terdapat pelaku usaha yang diterbitkan sertifikat pada periode ini.

Berdasarkan perhitungan data Pusat Produksi Primer BPPMHKP diperoleh data capaian kinerja Triwulan 1 realisasi indikator ini adalah :

A = CPIB Kapal 70,00 % , B = CPIB 65,00 % , C = CBIB 65,00 %
D = CPPIB 70,00 % , E -F = CDOIB- CPOIB 70,00 %

Sehingga diperoleh persentase capaian sbb :

$$(\% X = \frac{(70\%+65\%+65\%+70\%+70\%)}{5}) = 68,00 \%$$

Adapun Target dan Realisasi berdasarkan Jumlah Sertifikat yang diterbitkan pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sbb :

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2026	Target Th. 2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target (Sertifikat)	0	6	6	4	5	10	15		15
Realisasi (Sertifikat)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Capaian (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stasiun PPMHKP Sorong saat ini masih dalam tahapan pendataan pelaku usaha produksi primer dan sekaligus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha produksi primer untuk melakukan sertifikasi pada bidang usaha yang mereka miliki.



Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	72	68	94,44

Outcome yang diharapkan dari indikator kinerja Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Sorong pada Triwulan I tahun 2026 adalah mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

IK.2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan. Sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong penerapan HACCP pada industri perikanan. Melalui berbagai program inspeksi, monitoring evaluasi (monev), dan surveilan HACCP, KKP memastikan bahwa setiap pelaku industri perikanan, mulai dari nelayan, pembudidaya, hingga pengolah dan eksportir, memahami pentingnya menjaga standar keamanan pangan. Selain itu, KKP juga memberikan bimbingan teknis serta pendampingan untuk penerapan HACCP yang efektif di berbagai tahap produksi dan distribusi produk perikanan Target



dan Realisasi Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi indikator kinerja Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah :

$$\% X = \frac{(A+B+C)}{xn}$$

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
- B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
- C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk (3)

Realisasi Indikator ini pada Triwulan I adalah : *)

A = HACCP 77,78 % , B = SKP 90,00 % , C = SPDI 62,50 %

$$\begin{aligned} \% X &= \frac{(77,78 \% + 90,00 \% + 62,50 \%)}{3} \\ &= 76,76 \% \end{aligned}$$

Adapun Target dan Realisasi berdasarkan Jumlah Sertifikat yang diterbitkan pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sbb :

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2026	Target Th. 2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target (Sertifikat)	5	6	11	7	8	15	26		15
Realisasi (Sertifikat)	5	0	0	0	0	0	0	5	
Capaian (%)	100%	0	0	0	0	0	0	0	

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	72	76,76	106,61





IK.3 Lokasi Pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI dengan Monitoring kesegaran ikan, Residu Bahan Berbahaya Lingkup Stasiun Sorong

Monitoring Kesegaran Ikan, Residu, Bahan Berbahaya, Racun Hayati Laut (Marine Biotoxin), dan Lingkungan Perairan bertujuan mendapatkan data dan informasi kondisi kesegaran ikan, residu, bahan berbahaya, racun hayati laut (marine biotoxin), dan lingkungan perairan serta menjamin implementasi program monitoring kesegaran ikan, residu, bahan berbahaya, racun hayati laut (marine biotoxin), dan lingkungan perairan berjalan dengan efektif.

Kegiatan Monitoring Marine Biotoxin pada Tahun 2026, di Stasiun PPMHKP Sorong dilakukan setiap Triwulan.

Pada tanggal 11 - 13 Februari 2026 Inspektur mutu BPPMHKP Sorong telah melakukan kegiatan pengambilan sampel pada WPP 715 (Perairan Raja Ampat) dan Pasar Tradisional Waisai Raja Ampat.

Capaian indikator ini berupa Laporan Marine Biotoxin Triwulan I yang didukung dengan Laporan Hasil Pengujian Sampel yang diterbitkan oleh Laboratorium Terakreditasi . Pengujian Ciguatera (ASP, NSP dan PSP) dan Logam Berat (Pb, Cd, Hg) dilakukan di Lab. BUSPPMHKP sedangkan untuk Mikrobiologi (Salmonella dan E.Coli) pada Lab. Stasiun PPMHKP Sorong. Hasil pengujian menunjukkan tidak terdapat parameter pengujian yang melampaui batas maximum yang dipersyaratkan.

Realisasi dan target untuk Indikator ini dihitung pada akhir tahunan, namun pelaksanaan pengambilan sampel dan pengujiannya dilakukan setiap Triwulan.

Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Lokasi Pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Lokasi)	71	100	120,00





Sasaran Program 2.

- **Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar**

Realisasi sasaran program Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 0,00 %. Pencapaian sasaran program ini akan diperoleh dari pencapaian indikator; Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong.

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

IK. 4 Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong

Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional.

Nilai kualitas penerapan Quality Managemen System (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi. Sistem jaminan mutu Laboratorium dilakukan dengan Akreditasi SNI/ISO 17025:2017 sebagai standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. Adapun sistem jaminan mutu lembaga inspeksi dilakukan dengan SNI/ISO/IEC 17020:2012 sebagai standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Stasiun PPMHKP dilakukan assesment dari pihak eksternal yaitu Komite Akreditasi Nasional untuk mendapatkan status Terakreditasi pada





Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi. Adapun Tahun 2026 Laboratorium Penguji dijadwalkan melakukan Survailen ke-2 pada bulan Mei 2026, sedangkan untuk Lembaga Inspeksi akan dilakukan Survailen ke-2 pada bulan Februari Taun 2027.

Penilaian eksternal yang dilakukan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP menjadi nilai dari indikator kinerja ini. Jadwal penilaian adalah bulan Mei tahun 2026. Sehingga nilai indikator ini akan diperoleh pada Triwulan 2.

Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja 4

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong	0	0	0



Sasaran Program 3

- **Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Sorong**

Realisasi sasaran program Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar **116,47** Keberhasilan pencapaian sasaran program ini diperoleh dari pencapaian indikator a). Indeks profesionalisme ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong, b). Nilai pembangunan integritas lingkup Stasiun PPMHKP Sorong, c). Nilai penilaian mandiri SAKIP, d) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Sorong, e). Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) f). Nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) , g) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup SPPMHKP Sorong, h). Indeks kepuasan masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

IK.5 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas- tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Perhitungan Indeks Profesional ASN dilakukan pada akhir tahun, namun dalam selang waktu tersebut juga dilakukan pengukuran dilakukan pada Semester I.

Adapun formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN adalah :

$$Indeks = (25 \times A) + (25 \times B) + (25 \times C) + (25 \times D)$$



Keterangan :

- A : Persentase nilai pejabat yang mengikuti pelatihan
- B : Persentase capaian output pegawai pada SKP
- C : Persentase tingkat kehadiran pegawai
- D : Persentase LHKPN/LHKASN

Capture data Tahun 2026 Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PPMHKP Sorong melalui : <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024/unker/1296?page=3>

Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja 5

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun Sorong (Indeks)	0	0	0

Data dukung capaian indikator ini, dapat dikonfirmasi pada Aplikasi Ropeg KKP

IK. 6 Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi. Unit pelaksana teknis berkewajiban melakukan pemenuhan terhadap setiap komponen yang menjadi objek penilaian. Adapun komponen penilaian tersebut adalah :

- a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
- d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
- e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
- f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.



Pembangunan dan evaluasi ZI digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam membangun ZI pada satuan/unit kerja sehingga mempunyai pemahaman yang sama tentang hakikat pembangunan ZI. Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM meliputi a. penancangan ZI; b. penetapan unit kerja; c. pembangunan unit kerja; d. pemantauan Pembangunan ZI.

Pada Tahun 2026 indikator ini ditargetkan sebesar 77 % yang merupakan target cascading langsung dari pusat Eselon 1. Perhitungan dilakukan untuk nilai posisi akhir (Tahunan) dengan melihat persentase dokumen pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan. Nilai realisasi akan ditentukan setelah Semester II - **periode penilaian adalah tahunan.**

Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja 6

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	0	0	0

IK. 7 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Penilaian atas AKIP BPPMHKP dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan parameter, yaitu Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (25%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Kinerja (10%); Pencapaian Kinerja (20%). Berdasarkan PermenpanRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan predikat 'D' sampai dengan "AA.

Target Nilai Penilaian mandiri SAKIP Satker Stasiun PPMHKP Sorong pada Tahun 2026 adalah 86,20 dengan **periode penilaian adalah tahunan.**

Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja 7

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	0	0	0



IK. 8 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada SPPMHKP Sorong berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2024 s.d Triwulan I Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh SPPMHKP Sorong yang menjadi objek pengawasan.

Penghitungan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Stasiun PPMHKP Sorong adalah sebagai berikut :

$$NK = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan :

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I

Pada tahun 2026, semua rekomendasi LHP telah ditindaklanjuti pada aplikasi SIDAK. Sehingga persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Stasiun PPMHKP Sorong. Pada Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi 100% dari target 86,20%.

Pada periode Triwulan I tidak ada kunjungan dari APIP KKP ke Stasiun PPMHKP Sorong, sehingga nilai Indikator Kinerja yang digunakan pada indikator ini adalah nilai pada Tahun 2026 sebesar 100% (semua rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan data pada aplikasi SIDAK).

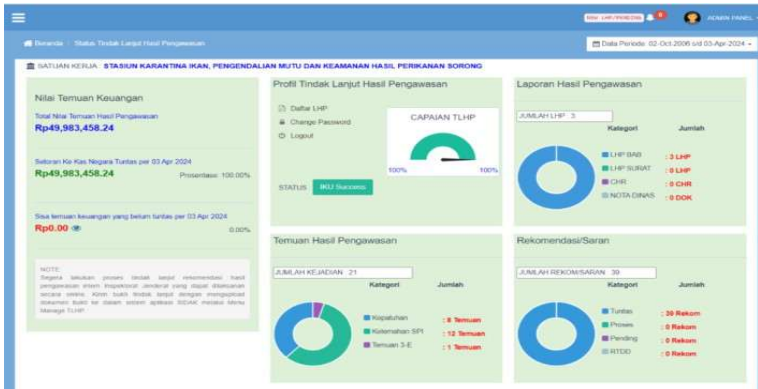
Tabel 2.9 Capaian Indikator Kinerja 8

Indikator Kinerja	TRIWULAN IV		
	TARGET	REALISASI	%
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	86	100	120,00





Data dukung capaian indikator ini, dapat dikonfirmasi pada Aplikasi SIDAK KKP



Gambar 2.3. Dashboard Persentase Temuan Itjen KKP Pada Aplikasi SIDAK KKP Tahun 2026

IK. 9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BPPMHKP didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.

Pada Tahun 2026 indikator ini ditargetkan sebesar 92,10. Perhitungan dilakukan untuk **nilai posisi akhir (Tahunan)** dan nilai Semester 1 sebesar 83, sehingga nilai realisasi akan ditentukan setelah Semester II berakhir.

Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja 9

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	0	0	0





Data dukung capaian indikator ini, dapat dikonfirmasi pada Aplikasi **MY INTERES**

myintress.kemenkeu.go.id/layout/data-view/ikpaservice/ikpa1/indikatorKinerjaSatker

MyIntress

Cari Menu, contoh: Register Hibah

Tahun Anggaran: 2026

MARINI ABBAS SATKER-649711

Admin

Anggaran

Komitmen

Bendahara

Pembayaran

Persediaan

Aset Tetap

Piutang

Rekonsiliasi

Akuntansi dan Pelaporan

Lainnya

Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker

Filter

PDF

Excel

Filter Aktif: SAMPAI DENGAN: MARET

Cari di Halaman...

KODE KPPN	KODE SA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPN (PENGURANGAN)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL KONVERSI BOBOT)
					REVISI DIPA	DEVIASI PELAKSANAAN DI DIPA	NILAI ASPEK	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	NILAI ASPEK	CAPAIAN OUTPUT				
006	032	649711	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	55,00	80,00%	0,00	68,75
					10,00	15,00		20,00	0	0	10,00	25	0,00				

Gambar 2.4. Dashboard IKPA Satker Stasiun PPMHKP Sorong untuk periode s/d Maret 2026 pada Aplikasi My Interes

IK. 10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun PPMHKP Sorong

Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011.

$$NK = (P \times W_p) + (K \times W) + (PK \times W_{pk}) + (E \times W_E)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

- P : Dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)
- K : Antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)
- PK : Dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) = 43,5%)
- E : Dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) = 28,6%).



Pada Tahun 2026 indikator ini ditargetkan sebesar 71,75. **Perhitungan dilakukan untuk nilai posisi akhir (Tahunan).**

Tabel 2.9 Capaian Indikator Kinerja 10

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	0	0	0

Data dukung capaian indikator ini, dapat dikonfirmasi pada Aplikasi Monev DJA/ Kemenkeu (SMART DJA).

IK.11 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Indikator ini merupakan nilai cascading langsung dari Eselon 1 yang ditargetkan sebesar 77 %. Pada Triwulan I tahun anggaran 2026, RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP 100% sebagaimana hal tersebut telah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi mandatory penilaian.

Tabel 2.14 Capaian Indikator Kinerja 11

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	77	100	120.00

Data dukung capaian indikator ini adalah Nota Dinas dari Sekertariat Jenderal NOMOR 283/SJ.7/PL.410/IV/2026 tanggal 7 April 2026 tentang Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan I tahun anggaran 2026. dan Aplikasi SIRUP . (*Lampiran 3*)

IK. 12 Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) di UPT lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses aplikasi survey kepuasan masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/61>. Target Indikator ini pada Tahun 2026 adalah nilai sebesar 3,50 yang merupakan rata- rata dari pengukuran setiap triwulan.

Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan pengukuran IKM yang melibatkan 44 responden dengan hasil nilai IKM adalah 3,96 atau 113,14% dari target. Data dukung capaian indikator berupa Laporan IKM Triwulan I yang telah dilaporkan ke Pusat MM BPPMHKP.

Tabel 2.16 Capaian Indikator Kinerja 15

Indikator Kinerja	TRIWULAN IV		
	TARGET	REALISASI	%
Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (nilai)	3,50	3,96	113,14

Data dukung capaian indikator ini adalah Surat dari Sekertariat BPPMHKP. Nomor : B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2026 tanggal 14 April 2026 tentang Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 Tahun 2026 UPP BPPMHKP. (*Lampiran 3*)

2.4. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Stasiun PPMHKP Sorong sampai Triwulan I Tahun 2026 mencapai **Rp. 1,021,929,934** atau **28,78%** dari pagu anggaran Stasiun PPMHKP Sorong(T.A) 2026 yang tidak terblokir (Pagu Efektif) sebesar **Rp. 3,550,850,000,-**. Adapun pagu defenitif adalah **Rp. Rp. 3,573,254,000**, dengan jumlah blokir adalah **Rp. 22,404,000,-**. Adapun anggaran awal DIPA Tahun 2026 adalah **Rp. 3.983.372.000** yang selanjutnya telah dilakukan efisiensi dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional dengan pembentukan RO khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Stasiun PPMHKP SorongTriwulan I Tahun 2026 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Secara umum rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PPMHKP SorongTriwulan I Tahun 2026 sebesar 108,50% (kategori baik).
2. Dari 12 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2026, terdapat 1 IKU yang tidak memenuhi target dan sebanyak 4 IKU melebihi target pada Triwulan 1. Selain itu terdapat 7 IKU yang tidak ditetapkan sebagai target pada Triwulan 1 dan tidak memiliki realisasi.

3.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan I Tahun 2026, dan sebagai upaya peningkatan kinerja pada Triwulan berikutnya hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Terdapat IKU Produksi Primer yang tidak memenuhi target pada Triwulan 1 dan juga berpotensi tidak tercapai pada Triwulan 2, hal ini disebabkan tidak adanya pelaku usaha yang melakukan pendaftaran untuk dilakukan inspeksi/verifikasi terhadap unit usahanya. Adapun kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha misalnya - CPIB Kapal, karena awak kapal perikanan belum tersedia awak kapal yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan untuk permohonan Sertifikasi CPIB Kapal; hal yang sama pada CBIB dan CPIB Pembenihan karena belum ada personil yang mengetahui tata cara pengajuan permohonan sertifikasi, atau belum ada personil yang memenuhi kualifikasi untuk pemenuhan persyaratan. Sehingga direkomendasikan untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada pelaku-pelaku usaha potensial agar informasi dapat tersampaikan.
2. Realisasi RPD Hal III DIPA untuk setiap triwulan berpotensi tidak maksimal karena adanya Revisi DIPA dan buka-blokir anggaran yang bersumber dari dana PNBPN. Sehingga direkomendasikan untuk melakukan penyesuaian RPD setiap awal triwulan untuk memaksimalkan nilai IKPA.
3. Terdapat kegiatan teknis (non Dukman) yang seluruh anggarannya terblokir ataupun bersumber dari PNBPN sehingga berpotensi realisasi volume kegiatan tidak tercapai pada Triwulan 2. Sehingga direkomendasikan untuk berkoordinasi dengan bagian program UPT maupun Pusat dalam pelaksanaan buka blokir yang selektif sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN 1 : Perjanjian Kinerja Stasiun PPMHKP Sorong Tahun 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN SORONG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nikmatul Rochmah**
Jabatan : **Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : **Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Sorong



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nikmatul Rochmah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN SORONG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Sorong	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Indeks)	3,5



Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	185.550.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	70.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	3.727.822.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Sorong Tahun 2026		3.983.372.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Sorong



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nikmatul Rochmah





LAMPIRAN 2 : Capaian Indikator Kinerja Organisasi Triwulan 1 pada Aplikasi Kinerja KKP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

e-Kinerja

Home

Jumat, 17 April 2026

NKO Maret - 2026

Unit Kerja : STASIUN PPMHKP SORONG

Skor Kinerja : 108.50

Download

• Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓

• Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol

• Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input
SK.01	Terseleenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan											
IKSK.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%) Data Dukung1 Tambah Data Dukung+ Data Dukung?	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	72.00	72.00	68.00	94.44	72.00	68.00	94.44	14-Apr-2026 12:55
IKSK.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%) Data Dukung1 Tambah Data Dukung+ Data Dukung?	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	72.00	72.00	76.76	106.61	72.00	76.76	106.61	14-Apr-2026 12:55
IKSK.3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai) Data Dukung1 Tambah Data Dukung+ Data Dukung?	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71.00	0.00			0.00	0.00		14-Apr-2026 12:55
SK.02	Terseleenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar											
IKSK.02.1	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%) Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71.00	0.00			0.00	0.00		15-Apr-2026 08:17

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

e-Kinerja

Home

Jumat, 17 April 2026

SK.02	Terseleenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar											
IKSK.02.1	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%) Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71.00	0.00			0.00	0.00		15-Apr-2026 08:17
SK.03	Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Sorong											
IKSK.03.1	Indeks Profesionalisme ASN Lingkup Stasiun KIPM Sorong (Indeks) Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82.50	0.00		116.47			116.47	15-Apr-2026 08:17
IKSK.03.2	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77.00	0.00			0.00	0.00		15-Apr-2026 08:17
IKSK.03.3	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86.20	0.00			0.00	0.00		15-Apr-2026 08:17
IKSK.03.4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%) Tambah Data Dukung+ Data Dukung1	Persen	Maximize	Rata-rata	86.00	86.00	100.00	116.28	86.00	100.00	116.28	14-Apr-2026 12:55
IKSK.03.5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92.10	0.00			0.00	0.00		15-Apr-2026 08:17
IKSK.03.6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71.75	0.00			0.00	0.00		15-Apr-2026 08:17
IKSK.03.7	Persentase rencana umum pengadaan PB yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%) Tambah Data Dukung+ Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77.00	77.00	100.00	120.00	77.00	100.00	120.00	14-Apr-2026 12:55
IKSK.03.8	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Indeks) Tambah Data Dukung+ Data Dukung1	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3.50	3.50	3.96	113.14	3.50	3.96	113.14	14-Apr-2026 12:55

Cetak



LAMPIRAN 3

Nota Dinas IKU Rencana Umum Pengadaan Triwulan 1 Tahun 2026

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 7 April 2026

Kewajiban mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah keharusan hukum bagi Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di kementerian/lembaga/perangkat daerah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Pada tahun anggaran 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 156 (seratus lima puluh enam) satuan kerja Pengelola DIPA Aktif dan tersebar pada 10 (sepuluh) Unit Kerja Eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan kegiatan identifikasi belanja pengadaan yang dicatatkan dalam bentuk Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Target dari kegiatan tersebut adalah memperoleh persentase pengumuman RUP atau RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP 100% sebagaimana hal tersebut telah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi *mandatory* penilaian.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
13		BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	304,871,258,000	304,871,258,000			
6	427624	BALAI KIPM DAN KHP DENPASAR	2,030,406,000	2,030,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	649568	BALAI KIPM DAN KHP ENTIKONG	526,628,000	526,628,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	649682	BALAI KIPM DAN KHP JAKARTA II	2,027,441,000	2,027,441,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567812	BALAI KIPM DAN KHP JAYAPURA	942,893,000	942,893,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	567631	BALAI KIPM DAN KHP MANADO	1,141,041,000	1,141,041,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	567758	BALAI KIPM DAN KHP MATARAM	922,433,000	922,433,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	427567	BALAI KIPM DAN KHP MEDAN I	1,053,502,000	1,053,502,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	649661	BALAI KIPM DAN KHP SEMARANG	1,436,067,000	1,436,067,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	427542	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA I	2,120,230,000	2,120,230,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	649788	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA II	3,290,509,000	3,290,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	649640	BALAI KIPM DAN KHP TJ. PINANG	388,074,000	388,074,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	649572	BALAI KIPM DAN KHP TARA KAN	872,480,000	872,480,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	662897	BALAI UJI STANDAR KIPM DAN KHP	23,387,383,000	23,387,383,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	440807	SEKRETARIAT BPPMKHP	222,620,591,000	222,620,591,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	567694	STASIUN KIPM DAN KHP KENDARI	228,306,000	228,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	645691	STASIUN KIPM DAN KHP MAMUJU	132,060,000	132,060,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	649711	STASIUN KIPM DAN KHP SORONG	264,756,000	264,756,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	649589	STASIUN KIPM DAN KHP ACEH	1,094,470,000	1,094,470,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	645693	STASIUN KIPM DAN KHP BANDUNG	753,105,000	753,105,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
25	427649	STASIUN KIPM DAN KHP BATAM	683,227,000	683,227,000	0	100.00%	Sudah Sesuai



LAMPIRAN 4

Nota Dinas IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 Tahun 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : 1066/BPPMHKP.1/HM.450/IV/2026 10 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan OP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP).

Target Indeks SKM yang ditetapkan pada Triwulan I tahun 2026 adalah 3,5 sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026 masing-masing OP lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah capaian dari hasil validasi SKM berdasarkan Nota Dinas Nomor 1273/SJ.8/TU.140/IV/2026 perihal Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2026 oleh Kepala Pusat Data dan Informasi.

1. Indeks SKM yang didapatkan dari seluruh OP BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 3,85 dan mutu pelayanan diperoleh "A" kategori "Sangat Baik". Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) responden yang melakukan survei.
2. Jumlah OP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM dengan kategori sangat baik tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) OP dan kategori baik sebanyak 1 (satu) OP. OP dengan nilai SKM tertinggi diraih oleh Stasiun PPMHKP Gorontalo, Stasiun PPMHKP Palu, dan Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan .





**Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP)
lingkup BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026**

NO	OP	INDEKS PER-UNSUR LAYANAN										INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
1	Stasiun PPMHKP Gorontalo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	55	Online	
2	Stasiun PPMHKP Palu	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	28	Online	
3	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	A	Sangat Baik	11	Online	
4	Stasiun PPMHKP Merak	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,98	3,98	4,00	3,98	3,99	99,81	A	Sangat Baik	43	Online	
5	Balai PPMHKP Banjarbaru	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,97	3,99	3,99	3,99	3,99	99,77	A	Sangat Baik	157	Online	
6	Stasiun PPMHKP Temale	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	99,54	A	Sangat Baik	54	Online	
7	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	3,99	3,98	3,99	3,97	3,98	3,96	3,98	3,97	3,98	3,98	99,46	A	Sangat Baik	225	Online	
8	Stasiun PPMHKP Pangkal Pinang	4,00	3,94	3,97	3,92	3,94	4,00	3,97	3,94	4,00	3,97	99,15	A	Sangat Baik	36	Online	
9	Stasiun PPMHKP Sorong	3,98	4,00	3,98	3,95	3,98	3,95	3,93	3,95	3,95	3,96	99,07	A	Sangat Baik	42	Online	
10	Balai PPMHKP Mataram	3,96	3,92	3,96	3,96	3,96	3,92	3,96	3,96	3,96	3,95	98,82	A	Sangat Baik	26	Online	
11	Stasiun PPMHKP Bengkulu	3,80	4,00	4,00	3,95	4,00	3,90	3,90	4,00	3,95	3,94	98,61	A	Sangat Baik	20	Online	
12	Stasiun PPMHKP Bima	4,00	3,88	3,88	3,75	4,00	4,00	4,00	3,88	4,00	3,93	98,26	A	Sangat Baik	8	Online	
13	Stasiun PPMHKP Aceh	3,67	4,00	4,00	3,67	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,93	98,15	A	Sangat Baik	3	Online	
14	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	3,91	3,70	3,87	3,96	3,96	4,00	4,00	4,00	3,91	3,92	98,07	A	Sangat Baik	23	Online	
15	Balai PPMHKP Makassar	3,93	3,92	3,92	3,90	3,93	3,90	3,91	3,92	3,92	3,92	97,96	A	Sangat Baik	368	Online	
16	Stasiun PPMHKP Padang	4,00	4,00	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	4,00	3,88	3,92	97,92	A	Sangat Baik	8	Online	
17	Balai PPMHKP Balikpapan	3,89	3,88	3,95	3,86	3,91	3,82	3,84	4,00	4,00	3,91	97,66	A	Sangat Baik	57	Online	
18	Balai PPMHKP Denpasar	3,92	3,91	3,87	3,90	3,91	3,88	3,90	3,92	3,92	3,90	97,61	A	Sangat Baik	151	Online	
19	Stasiun PPMHKP Pontianak	3,96	3,96	3,96	3,98	3,98	3,79	3,77	3,79	3,79	3,89	97,22	A	Sangat Baik	53	Online	
20	Stasiun PPMHKP Luwu Banggai	3,93	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,93	3,93	3,93	3,89	97,22	A	Sangat Baik	14	Online	
21	Stasiun PPMHKP Cirebon	3,94	3,92	3,92	3,91	3,87	3,85	3,84	3,89	3,86	3,89	97,20	A	Sangat Baik	118	Online	
22	Stasiun PPMHKP Merauke	3,91	3,91	3,82	3,82	3,86	3,91	3,82	3,86	3,82	3,86	96,46	A	Sangat Baik	22	Online	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara